

# POLA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MENCEGAH PEMAHAMAN RADIKALISME DI KAB. MANDAILING NATAL

<sup>1</sup>Elismayanti Rambe, <sup>2</sup>Rahmi Wahyuni

[elismayantirambe@stain-madina.ac.id](mailto:elismayantirambe@stain-madina.ac.id), [rahmiwahyuni@stain-madina.ac.id](mailto:rahmiwahyuni@stain-madina.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

## ABSTRAK

*Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang tertua dengan segala kekhasannya di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan islam yang melahirkan kader-kader ulama pesantren juga diterpa isu negatif sebagai institusi yang bisa memunculkan paham radikalisme agama yang bisa menjadi ancaman bagi NKRI. Tulisan ini berupaya untuk menelaah tentang penerapan nilai-nilai multikulturalisme di pesantren dalam mengantisipasi radikalisme agama. Ada beberapa faktor yang membentuk itu Pertama, mengimplementasikan Islam rahmatan li'l- 'ālamīn melalui pola pengajaran, materi pembelajaran, yang pada akhirnya membentuk karakter santri yang inklusif, ramah, dan toleran. Toleransi disini tidak hanya pada tataran konseptual, melainkan juga pada teknik operasionalnya. Kedua, secara praksis warga pesantren mampu melakukan adaptasi sosial dalam bentuk komunikasi interaktif dengan masyarakat sehingga persepsi radikalisme yang selalu diidentikkan dengan pesantren bisa terbantahkan.*

*simpulan dari kajian ini menekankan peran pesantren dalam membendung radikalisme, secara instiusional harus responsif dan menekankan keimanan dan akhlak karimah. Pendidikan pesantren harus berbasis multikultural, termasuk di dalamnya pemahaman tentang realitas keberagamaan. Sebagai institusi pendidikan keagamaan yang mampu mengolah dan meramu segala kearifan lokal dalam wajah Islam Nusantara, pesantren diharapkan dapat membantah persepsi dunia tentang Islam yang selalu diidentikkan dengan agama teror dan kebencian.*

**Kata Kunci :** *pola komunikasi, pesantren, radikalisme*

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari sebuah komunikasi, baik yang bersifat verbal maupun non verbal. Komunikasi itu sendiri berlangsung dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi sampai dengan komunikasi massa. Masing-masing konteks memiliki karakteristik unik yang semuanya menghendaki adan-

ya efektivitas dalam prosesnya.<sup>1</sup> Dalam ranah pendidikan penggunaan komunikasi yang tepat dapat membantu terwujudnya tujuan-tujuan dari sebuah lembaga pendidikan.

Di Indonesia lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren sudah ada sejak masa penjajahan sampai saat ini berkembang sangat pesat ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Kenyataan ini bisa dilihat dari jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya semakin hari semakin meningkat untuk masuk ke pondok pesantren karena disini mereka mendapatkan

---

<sup>1</sup>Suciati, Komunikasi Interpersonal, ( Yogyakarta : Buku litera Yogyakarta, 2015), h. 1

pendidikan agama dan juga pendidikan umum serta di bekali berbagai keterampilan yang dapat mengembangkan potensi diri.

Pondok pesantren berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik agar diminati oleh masyarakat, baik dari segi sistem pendidikan, dan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai target yang di harapkan pondok pesantren harus memiliki pola komunikasi baik komunikasi intern ( di dalam lingkungan pesantren) maupun ekstren keluar lingkungan pesantren). Kemampuan berkomunikasi adalah hal yang menjadi penting bagi sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren, mengingat bahwa di pesantren identikkan dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang sangat kuat , cinta terhadap Allah, Rasul dan ajaran-ajaran agama yang apabila tidak diajarkan tentang nilai-nilai perbedaan maka bisa berpotensi menjadi pemahaman yang radikal.

Banyaknya kejadian yang di indikasikan oleh gerakan radikalisme agama yang berujung pada aksi terror turut membawa institusi pendidikan islam ke dalam isu negatif. Dikutip dari laman berita republika BPNT pada tanggal 2 february 2016 menyebutkan 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi menyebarkan radikalisme dan terorisme. Polemik mengenai isu terorisme terhadap pesantren tersebut berkembang “liar” dan menimbulkan perdebatan publik, karena penyebutan oleh BNPT pada saat itu hanya berselang sebulan setelah peristiwa teror bom Thamrin Jakarta (14 Januari 2016).<sup>2</sup> Sejalan dengan banyaknya gerakan-gerakan radikal berbasis agama, sesungguhnya pesantren sebagai komunitas yang lebih terfokus pada ”*Tafakkuh fid dien*” memiliki peran yang besar untuk mengantisipasi arus gerakan-gerakan radikal terse-

---

2

<https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/16/orn905396-isu-radikalismeterorisme-dan-pendidikan-ponpes>, di akses pada tanggal 23 Januari 2020.

but di masyarakat. Pada tataran normatif dan empiris pesantren memiliki konstribusi besar untuk memberikan pandangan, sikap serta alternatif untuk meminimalisir berkembangnya gerakan radikal agama, seperti terorisme diantaranya dengan menerapkan pendidikan *multikulturalisme* sebagai upaya antisipasif di kalangan masyarakat pesantren dan sekitarnya.

Pentingnya internalisasi nilai multikultural di berbagai lembaga pendidikan apalagi di integrasikan dalam pembelajaran agama, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku, budaya dan agama. Strategi untuk menginternalisasikan juga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran pada materi Pendidikan Islam, yang mana guru harus bisa menjadikan peserta didik toleransi dan saling menghargai.<sup>3</sup> Implementasi pendidikan multikultural terdiri dari dua aspek yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif adalah pada impelemntasi konsep yang secara sistematis, sedangkan secara kuantitatif yaitu pendidikan multikultural belum terisolasi dengan baik terutama di lembaga Pendidikan Islam. Dengan pamaran diatas maka penulis merasa mendalami tentang pola komunikasi pendidikan pesantren dalam mencegah pemahaman radikalisme di Kab . Mandailing Natal

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplorasi dan inspeksi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didasari beberapa hal sebagai berikut : *pertama*, yang dikaji dalam penelitian ini adalah makna simbol dari suatu tindakan simbolik. *Kedua*, dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi dan pemahaman sendiri terhadap lingkungan simboliknya

---

<sup>3</sup> Syamsul Bahri, *Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dengan Pendekatan Aditif Dalam Pembelajaran Pai Di Sekolah Dasar Taman Harapan*, n.d., 143.

sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, penelitian tentang individu di dalam komunitas atau masyarakat tertentu, dalam hal ini pondok pesantren, sangat memungkinkan digunakannya pendekatan kualitatif, karena yang dikaji adalah fenomena yang tidak bersifat eksternal tetapi berada dalam diri masing-masing individu yang menjadi subyek penelitian. *Keempat*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Disini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangan subjek penelitian, terutama pandangannya terhadap penggunaan simbol-simbol. *Kelima*, proses interaksi simbolik yang didalamnya terkait dengan makna subyektif harus dipahami dalam kerangka “ungkapan” mereka sendiri, sehingga perlu dikaji dengan kerangka penelitian kualitatif. *Keenam*, studi interaksionisme simbolik termasuk bagian dari tradisi penelitian kualitatif yang berasumsi bahwa penelitian sistematis harus dilakukan dalam lingkungan yang alamiah.

## PEMBAHASAN

### 1. Pola Komuniasi

Pola Komunikasi Pola komunikasi terdiri dari kata pola dan komunikasi. Pola dikatakan sebagai model, yaitu cara untuk menunjukkan sebuah obyek yang mengandung kompleksitas proses didalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya, sedangkan kata komunikasi menurut Everret M. Rogers adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku.<sup>4</sup> Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola

hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lainnya. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Adapun pengertian komunikasi organisasi menurut Liliweri (2007) adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok yang bersifat impersonal (komunikasi yang berstruktur) yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok/unit kerja dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan adakalanya komunikasi publik dengan melibatkan komunikasi formal yang menurut struktur organisasi, yakni komunikasi keatas, komunikasi kebawah, komunikasi lateral dan komunikasi horizontal<sup>5</sup> (Mulyana,2009:13). Dari beberapa pengertian mengenai pola komunikasi dan komunikasi organisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi organisasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rancangan yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi.

---

<sup>4</sup> Hafied cangara , *Pengantar Ilmu Komunikasi*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 60

---

<sup>5</sup> Deddy Mulyana , *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.*( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) , h. 13

## 2. Penafsiran Tekstual pemicu Radikalisme Agama

Aksi radikal yang terjadi di dalam Islam banyak disebabkan oleh interpretasi umat Islam terhadap kitab suci dan Sunnah Nabi yang tekstual, skriptural, dan kaku. Alquran dan Sunnah tidak ditafsirkan secara kontekstual yang melibatkan historisitas teks dan dimensi kontekstualnya. Ayat-ayat yang cenderung mengarah pada aksi kekerasan, seperti kafir/kufur, syirik, dan jihad, sering ditafsirkan apa adanya, tanpa melihat konteks sosiologis dan historisnya. Apa yang mungkin tersirat di balik “penampilan-penampilan tekstualnya”-nya hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Dalam contohnya yang ekstrem, kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Alquran sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Dalam pandangan William Liddle, kelompok skripturalis tidak memandang diri mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba mengadaptasikan pesan-pesan Muhammad dan makna Islam ke dalam kondisi-kondisi sosial sekarang. Menurut mereka, pesan-pesan dan makna itu sebagian besar sudah jelas termaktub di dalam Alquran dan Hadis dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan.<sup>7</sup> Jargon “kembali kepada Alquran dan Sunnah” lebih banyak dimaksudkan sebagai perintah untuk kema-

li kepada akar-akar Islam awal dan praktik-praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas). Kalau umat Islam tidak kembali pada “jalan yang benar” dari para pendahulu mereka, maka mereka tidak akan selamat. Kembali kepada Alquran dan Sunnah ini dipahami secara skriptural dan totalistik.<sup>8</sup> Inilah keyakinan mereka tentang memperjuangkan Islam secara kaffah, yakni obsesi kembali ke masa lalu Islam secara keseluruhan tanpa melihat perubahan sosial-budaya yang telah dialami masyarakat Muslim dewasa ini. Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi Saw. Interpretasi semacam ini melahirkan sikap-sikap beragama yang galak dan keras, yang pada gilirannya melahirkan aksi kekerasan, radikal, bahkan teror. Tegasnya, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan kaku telah menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan di mana-mana. Ditambah lagi dengan kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dan akrab dengan ayat-ayat pedang (*jihad*), pengkafiran (*tafir*), dan pemusyrikan (*tasyrik*). Mereka lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan berbuat keras ketimbang ayat-ayat yang properdamaian. Alquran sebagai sumber yang paling otoritatif di dalam Islam memang sangat tergantung pada penafsiran pemeluknya. Karena itu, peradaban Islam oleh Nasr Hamid Abu Zayd disebut sebagai “peradaban teks” (*hadlrat al-nash*).<sup>9</sup> Akibat

---

<sup>6</sup> Bahtiar Effendy, “Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik”, dalam M. Dien Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. xvii.

<sup>7</sup> R. William Liddle, “Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru”, dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999).

---

<sup>8</sup> Shireen T. Hunter, *Politik Islam di Era Kebangkitan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 15

<sup>9</sup> Nasr Hamid Abu Zayd menyebut peradaban Islam sebagai peradaban teks, maknanya bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan di mana teks sebagai pusatnya tidak dapat diabaikan. Ini berbeda dengan peradaban Mesir Kuno yang memiliki peradaban pascakematian dan peradaban Yunani yang dikenal sebagai peradaban akal. Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum al-Nash Dirasat fi Ulum*

terpusatnya Islam pada teks, otoritas dalam melahirkan makna teks sangat ditentukan oleh penafsirnya. Di sinilah peran penafsir sangat penting dalam melahirkan makna yang terkandung dalam doktrin agama. Bisa jadi dengan teks-teks yang ada, penafsir justru melahirkan makna berdasarkan teks apa adanya. Padahal, Islam tidak sekadar dipahami sebagai teks (*nash*), tetapi juga dipahami sebagai sejarah (*tarikh*) yang tidak menafikan ruang/tempat dan adat-istiadat.<sup>10</sup> Artinya, interpretasi terhadap teks (*nash* Alquran) sangat memengaruhi pemikiran radikal atau tidaknya seseorang dalam beragama (Islam). Pemahaman skriptural-tekstual ini mudah sekali membentuk sikap sosial yang bersifat apologetic dan eksklusif. Dalam kehidupan sosial keagamaan, jika seseorang atau kelompok telah terpaku kuat pada pemahaman kitab suci secara literal-skriptural, tidak akan ada lagi kompromi, negosiasi, dan konsensus. Benih-benih dan akar munculnya tindak kekerasan dengan motif agama adalah pemahaman keagamaan yang bercorak literal-skriptural dan derivasinya, yaitu sikap sosial yang bersifat eksklusif dan apologetic.<sup>11</sup>

Pemahaman keagamaan yang literal, skriptural, dan kaku ini diserap oleh peserta didik di dalam satuan pendidikan di pesantren. Ironisnya, model pendekatan kependidikan yang digunakan bercorak doktrinal-literal-formal, sehingga melupakan perhatian terhadap aspek historisitas dari keberadaan dan kehidupan manusia yang selalu berubah-ubah. Secara formal,

---

Alquran, (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1993), hlm. 11.

<sup>10</sup> Abdul Jawab Yasin, *al-Sulthah fi al-Islam: al-'Aql al-Fiqhi al-Salafi baina al-Nash wa al-Tarikh*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, t.t.), hlm. 13

<sup>11</sup> Charles J. Adams, "Islamic Religion Tradition", dalam Leonard Binder, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, (New York: John Wiley and Sons, 1976), hlm. 35-41.

pemikiran ini bertahan pada "rumus-rumus formal-doktrinal" keagamaan begitu saja adanya, tanpa perlu melihat dan mempertimbangkan kondisi sosio-historis yang ada pada tataran praksis. Model pendidikan keagamaan yang bercorak literal kurang begitu peduli terhadap aspek historisitas yang terkait dengan aspek sosiologis, politis, psikologis, dan ekonomis. Corak pendidikan literal juga kurang peduli terhadap model pendidikan keagamaan yang bersifat substansial-esensial yang lebih menyentuh nilai-nilai moralitas keagamaan, bukan nilai-nilai instrumental atau teknikal dari pemikiran keagamaan. Corak pendidikan keagamaan ini mudah menyalahkan orang lain, memusuhi, dan mengafirkan, yang pada gilirannya melahirkan aksi radikal.

Untuk dapat menghindarkan diri dari paham dan sikap radikalisme atau untuk dapat mencegah orang lain dari kecenderungan dan keterlibatan dalam radikalisme dan terorisme, dan atau agar persepsi tentang radikalisme dan terorisme tidak bersifat bias (berat sebelah) dan *pejorative* (meyudutkan), kiranya perlu dikenali ciri-cirinya. Sebab potensi radikalisme bila teraktualisasi dalam paham, sikap, dan tindakan selalu dapat ditandai dari ciri-cirinya. Ciri radikalisme dan terorisme itu sendiri dapat dilihat dalam dua kategori: *Pertama*, ciri radikalisme dan terorisme yang dimiliki oleh kaum radikal-teroris militant dan keras yang memang selalu ditemukan dalam sejarah umat manusia. *Kedua*, ciri-ciri radikal-teroris yang ditemukan pada orang-orang yang sesungguhnya bukan radikal dan teroris militan, melainkan memiliki ciri-ciri yang potensial untuk berkembang menjadi radikal dan teroris.

Lebih jauh dipaparkan bahwa radikalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia ikhtiar baru tahun 1995 adalah suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis. Sedangkan menurut

kamus ilmiah populer radikalisme adalah inti dari perubahan. Sementara radikalisme agama berarti, perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, yang mengambil karakter keras sekali antara dua pihak yang bertikai, yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu, atau bertujuan merubah situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama.<sup>12</sup>

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu. Secara historis, kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang baru. Karena pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat dan ekonomi kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diambil alih oleh kelompok Serikat Islam (SI). Gerakan radikalisme di Indonesia tidak seperti yang terjadi di Timur tengah yang sangat menekankan agenda-agenda politk.<sup>13</sup>

Secara garis besar ada sepuluh yang menjadi ciri kaum radikal dan teroris.:

*Pertama*, tekstualis (literalis) dan kaku (*rigid*) dalam bersikap dan memahami teks-teks suci. Cara memahami teks yang rigid dan tekstualis itu mengakibatkan kesimpulan yang melompat (*jumping to conclusion*). Misalnya adanya peringatan kitab suci mengenai pemerintahan yang zalim dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pimpinan Negara dan pemerintah yang tidak sesuai dengan pemahannya sebagai *thaghut* atau *thughyan*. Pada saat yang sama, pentunjuk kitab suci tentang kaum kafir digunakannya sebagai alat takfir; mengafirkan orang yang

tidak seagama atau tidak sepaham dengannya.

*Kedua*, ekstrem, fundamentalis, dan eksklusif. Ekstrem dimaksudkan sebagai sikap selalu berseberangan dengan *mainstream*, arus umum, terutama pemerintah. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang kaku. Sementara fundamentalis dimaksudkan adalah orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstualis. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan beragama sehingga dikenal dengan adanya fundamentalisme agama. Ernest Gellner menyebutkan fundamentalisme sebagai kekuatan atau dalam bahasa Perancis *integrisme* yang dapat menunjukkan gagasan bahwa iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, tidak mengenal kompromi, keluwesan, interpretasi atau pengurangan. Pandangan ini lebih menganggap doktrin sebagai inti agama dan dapat diterapkan secara persis dan paripurna.

*Ketiga*, eksklusif. Kaum radikal selalu memandang paham dan caranya sendirilah yang benar. Sementara paham dan cara pandang orang lain dianggap salah dan keliru. Bahkan Kallen menyebutkan, karena kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program dan ideologinya, mereka menempatkan semua yang lain dalam posisi salah dan keliru.

*Keempat*, selalu bersemangat mengoreksi orang lain. Sebagai lanjutan dari sikapnya yang eksklusif, kaum radikal memiliki semangat yang tinggi untuk mengoreksi, menolak, dan bahkan melawan yang lain. *Kelima*, kaum radikal dan teroris membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dan dalam menegakkan serta mengembangkan paham dan ideologinya.

*Keenam*, kaum radikal dan teroris memiliki kesetiaan lintas Negara. Suatu tindakan radikal dan teror di suatu negara bisa

<sup>12</sup>Khamami zada, *Islam Radikalisme*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 87

<sup>13</sup>Azyumardi Azra, "Muslimin Indonesia: Viabilitas "Garis Keras" , dalam Gatra edisi khusus 2000, h. 45.

dikendalikan dan membalas apa yang dialami kelompoknya di Negara lain. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah banyaknya orang muslim di Indonesia yang ingin menuntut balas atas pembantaian muslim di Rohingnya di awal dekade kedua abad ke-21. Sebaliknya, banyak urusan umat muslim yang dipersulit di Negara dan daerah tertentu akibat pengalaman penganut suatu agama menghadapi kesulitan di Negara dan daerah muslim lain.

*Ketujuh*, ciri lain dari kaum radikal yang sangat menonjol adalah rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas. Hal tersebut terjadi karena orang yang tidak sepaham dengan mereka direkonstruksi sebagai musuh. Sehingga teman sebangsa dan senegara sering dianggap sebagai musuh karena keyakinan, prinsip, pendapat, dan latar belakang yang berbeda.

*Kedelapan*, karena konstruksi musuh yang tidak jelas tersebut, maka mereka melakukan *all out war* (perang mati-matian) terhadap yang dianggap musuh agamanya dan yang melakukan kemungkaran, meskipun tidak secara langsung memusuhi mereka, membunuh dan mengusirnya sebagai syarat perang agama.

*Kesembilan*, kaum radikal sangat konsen pada isu-isu penegakan Negara agama (dalam islam seperti khilafah), karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera karena menjadikan agama sebagai dasar Negara dan hukum.

Kesepuluh, kaum radikal sangat menekankan *tauhidyyah hakimyyah* dan menghukumi kafir terhadap orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum bernegara dan bermasyarakat. Di kalangan radikal muslim, misalnya dasar yang digunakan dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS.Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Bagi sebagian umat beragama, teru-

tama yang masih sangat sederhana pemahamannya mengenai Al-Qur'an, sering kali tertarik dengan cara mengedepankan maksud ayat yang tekstualis dan atomistik (terpisah dari ayat-ayat lain) seperti ini karena dianggap lebih menjawab emosi keagamaannya.<sup>14</sup>

adikalisme keagamaan sebagian yang lain, dipahami sebagai cara memperjuangkan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Mereka memperjuangkannya tanpa kompromi dan bila perlu dengan cara anarkisme dan kekerasan. Faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (1) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (2) ketidakadilan sosial, (3) kemiskinan, (4) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (5) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain.<sup>15</sup>

M. Dawam Raharjo mengemukakan 4 hipotesis yang melatar belakangi berkembangnya Islam radikal di Indonesia, yaitu: (1) Pengaruh gerakan-gerakan Islam transnasional seperti Ikhwan al-Muslimin, Hizbut Tahrir, Wahabisme Saudi Arabia, Islam Taliban, dan Al-Qaeda, yang semuanya mencita-citakan tegaknya syariat Islam di semua bidang kehidupan. (2) Pengaruh euphoria demokratisasi di Indonesia, yang dimaknai sebagai peluang bagi munculnya gerakan-gerakan Islam radikal yang pada masa Orde Baru dibungkam dan dipaksa tatarap oleh pemerintahan yang otoriter sekuler. (3) Gagalnya penegakan negara hukum demokratis, sehingga menimbulkan kembali inspirasi untuk menegakkan syariat Islam, sesuatu yang pada dasarnya bertolak belakang dengan sistem hukum demokratis

---

<sup>14</sup> Syahrin Harahap.. Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. ( Depok : Siraja, 2017), h.. 21-25.

<sup>15</sup>Nuhrison M. Nuh (ed.), *Peranan Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai*, h. 2.

yang sekuler. (4) Gagalnya gerakan dakwah yang *rahmatan li 'l- 'ālamīn*, yang toleran terhadap keyakinan beragama yang berbeda-beda dan bersifat inklusif. Berkembangnya gerakan dakwah yang eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman.<sup>16</sup>

Usaha mengatasi perkembangan dan perluasan gerakan radikal di masyarakat, harus dilakukan secara kolektif, atas dasar kesadaran dan keterlibatan penuh elemen masyarakat. Ada dua strategi yang bisa digunakan; kontra radikalisme dan de-radikalisasi. Kontra radikalisme merupakan upaya yang bersifat preventif (pencegahan), yang diarahkan pada semua elemen masyarakat. Kontra radikalisme dilakukan dengan kampanye pada semua elemen masyarakat, untuk membangun kesadaran atau pemahaman bahwa radikalisme dalam bentuk teror adalah bentuk kekerasan. Ia tidak ada terkait dengan ajaran keagamaan, harus dilawan secara bersama-sama. Gerakan kontra radikalisme telah menjadi bagian dari praksis dalam kehidupan pesantren sejak mereka membangun institusi. Terutama pesantren yang dibangun di atas pondasi moderatisme, sehingga spirit pembelajaran dan kehidupan pesantren diarahkan untuk menghindari, mencegah dan melawan segala bentuk radikalisme atas nama agama. Fenomena ini bisa ditemukan pada pesantren yang peneliti teliti.

Faktor utama yang menentukan terjadinya radikalisme dalam masyarakat adalah upaya provokatif melalui berbagai media massa. Provokasi tersebut oleh beberapa kelompok umat Islam dilihat sebagai pencideraan terhadap kebenaran yang mereka yakini, sehingga meresponnya dalam bentuk perilaku atau tindakan radikal. Oleh karenanya

---

<sup>16</sup> Thohir Yuli Kusmato, dkk. Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren, jurnal Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015

radikalisme bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan.<sup>17</sup>

### 3. Peranan Pesantren Dalam Lembaga Pendidikan Keagamaan

Pesantren dilahirkan atas dasar kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da'i. pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah “ tempat belajar para santri”, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu kata “pondok” juga berasal dari bahasa arab “*Funduq*” yang berarti hotel atau asrama.<sup>18</sup>

Perkembangan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun demikian faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan yang diperlukan sangat menentukan tumbuhnya suatu pesantren. Pada umumnya berdirinya suatu pesantren ini diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau ustad. Karena keinginan menuntut ilmu dari guru tersebut, masyarakat sekitar bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar.<sup>19</sup> Kemudian mereka membangun tempat tinggal yang sederhana disekitar tempat tinggal guru tersebut. Mekanisme kerja pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan system yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya yaitu :

---

<sup>17</sup>lex Susilo Wijoyo, “Shaykh Nawawi of Banten: Texts, Authority, an the Gloss Tradition,” *Ph.D. Dissertation*, (New York: Colombia University, 1997), h. 36-45.

<sup>18</sup> Enung K. Rukiati & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2006 ), h. 103

<sup>19</sup> Iskandar Engku & Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam*, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014) h. 116

- a. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dengan ustad.
- b. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problematika nonkurikuler mereka.
- c. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar ijazah karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedang santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah SWT.
- d. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealism, persaudaraan, penanaman rasa percaya diri dan keberanian hidup.
- e. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah.

#### 4. Pendidikan berbasis multikulturalisme dalam mengantisipasi radikalisme agama di pesantren

Multikultural adalah keberagaman budaya. Sementara secara etimologi, istilah multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Adapun secara hakiki, dalam kata multikulturalisme itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.<sup>20</sup> Sedangkan, kultur (budaya) itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari empat tema penting yaitu: agama (aliran), ras (etnis), suku, dan bu-

<sup>20</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75.

daya.<sup>21</sup> Hal ini mengandung arti bahwa pembahasan multikultur mencakup tidak hanya perbedaan budaya saja, melainkan masuk pula di dalamnya kemajemukan agama, ras maupun etnik.

Multikulturalisme ini pun suatu konsep di mana sebuah komunitas berbasis kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya- budaya yang beragam atau multikultur. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.<sup>22</sup> Sehingga, multikulturalisme tidak hanya mengakui adanya keragaman budaya, melainkan juga menghendaki adanya penghormatan dari masing-masing budaya yang berbeda.

Dengan demikian paradigma multikultural memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi dan *respect* terhadap budaya dan agama-agama lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian.<sup>23</sup>

Sementara itu, jika paradigma multikultural ini dibawa ke ranah pendidikan,

<sup>21</sup>Ain al-Rafiq Dawam, *Emoh Sekolah* (Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2003), hlm. 99-100.

<sup>22</sup>Nani Mahendrawati dan Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 34.

<sup>23</sup>Salmiwati, "Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural", *Jurnal Al-Ta'lim* (Vol. 20, No. 1, 2013), hlm. 337.

yang kemudian memunculkan istilah pendidikan multikultural bisa dipahami sebagai pendidikan untuk *people of color*.<sup>24</sup> Artinya, pendidikan yang di dalamnya terdapat berbagai macam manusia, atau pendidikan yang ditujukan untuk melihat keragaman manusia, atau lebih dari itu pendidikan yang mencoba melihat dan kemudian menyikapi realitas keragaman yang ada dalam diri manusia baik secara individu atau sebagai makhluk sosial. Semua pengertian tersebut bisa ditemukan titik temunya, bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang terkait dengan keberagaman manusia, ketika berbicara tentang multikulturalisme. Multikulturalisme merujuk pada tiga hal, pertama, multikulturalisme yang berkenaan dengan kebudayaan, kedua, merujuk pada keberagaman budaya, dan ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respons atas keberagaman tersebut. Dalam konteks negara, multikulturalisme seakan harus kehilangan keberagamaannya tatkala bersentuhan dengan otoritas pemerintah dan politik identitas. Pemerintah memiliki otoritas yang dominan sebagai pengatur budaya. Akhirnya yang muncul adalah monokultural, inilah yang pernah terjadi di Indonesia era Orde Baru. Dengan adanya otonomi daerah multikulturalisme menjadi sangat kuat karena lebih mengedepankan kepentingan dan keberagaman lokal. Berpijak dari makna multikulturalisme di atas, maka pendidikan multikultural menjadi solusi terbaik untuk menangani keberagaman budaya dan menumbuhkan penghargaan terhadap budaya lain. Pendidikan multikultural di pandang sebagai sebuah dimensi praktis multikulturalisme dan proses belajar alternative yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini serangkaian konsep, petunjuk tingkah laku, dan arena yang secara resmi diformulasikan melalui kurikulum, regulasi, metode

---

<sup>24</sup>Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural...*, hlm. 44.

Sejarah Islam tidak pernah lepas dari fanatisme dan eksklusivisme yang terjadi sejak masa stagnansi dan terus berlangsung hingga saat ini. Fanatisme dan eksklusivisme dinilai sebagai salah satu pemicu radikalisme. Guna mengantisipasi hal ini maka diperlukan alternatif berupa inklusivisme atau keterbukaan. Upaya deradikalisasi membutuhkan pondasi pemikiran multikulturalisme (*al-da'aim al-fikriyah fi fiqh al-ikhtilaf*) yang terdiri dari beberapa prinsip: pertama, kaum Muslimin harus menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Dikatakan niscaya sebab teks-teks agama Islam bersifat multi-interpretatif (*ya.htamilu al-aujuh*). Hal ini terbukti bahwa para sahabat telah terlibat dalam perbedaan penafsiran sejak masa kenabian, sehingga saat ini kaum Muslimin hendaknya tidak saling mengkafirkan hanya persoalan berbeda penafsiran; kedua, perbedaan umat Islam adalah rahmat dan bentuk kekayaan kebudayaan Islam yang justru akan membuat kaum Muslimin semakin dinamis dan leluasa menentukan pilihan pendapatnya; ketiga, setelah mengetahui keragaman pendapat dalam khazanah pemikiran Islam, sebaiknya kaum Muslimin berusaha memilih pendapat yang moderat, sebab di dalam khazanah keilmuan Islam terdapat pendapat-pendapat ulama yang keras yang sebaiknya di jauhi; keempat, menjauhi sikap mengklaim kebenaran sepihak; kelima, saling tolong-menolong dalam masalah yang disepakati oleh semua golongan; keenam, toleransi dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Prinsip kelima dan keenam ini terinspirasi dari slogan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar yang berbunyi “Kita harus saling menolong dalam masalah yang disepakati dan saling toleran dalam masalah yang diperdebatkan”. Yang dimaksud dengan toleransi adalah menghormati pendapat orang lain dan tidak fanatik kepada satu pendapat serta tidak mudah menyesatkan pendapat yang lainnya; ketujuh,

menghormati pendapat orang lain dengan menyadari bahwa kebenaran mungkin tercecer di mana-mana. Prinsip ketujuh ini terinspirasi dari pendapat para pakar ushul fiqh tentang kemungkinan adanya kebenaran yang lebih dari satu (*imk-an ta'adud al-shawab*).<sup>25</sup>

Pendidikan multikulturalisme yang menekankan pembentukan karakter anak didik yang memiliki sikap simpati, menghormati, mengapresiasi dan empati pada orang lain sudah semestinya menjadi tujuan pendidikan Islam. Para sosiolog juga meyakini bahwa pendidikan multikulturalisme merupakan solusi yang bagus untuk menciptakan harmoni antar elemen-elemen yang berbeda dari sebuah bangsa.<sup>26</sup>

#### 5. Implementasi penerapan multikultural di pesantren

James A. Banks menyatakan bahwa dalam pendidikan multikultural, setidaknya terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: pertama, pendekatan kontributif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktifitas-aktifitas tertentu seperti hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan dari berbagai macam kebudayaan.<sup>27</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keragaman kelompok, sehingga dapat dikembangkan dengan cara menawarkan muatan khas yang dapat dengan segera diakui dalam berbagai varian pen-

didikan multikultural, misalnya menggabungkan peringatan hari-hari besar keagamaan dengan hari kepahlawanan nasional. Kedua, pendekatan aditif, yaitu dengan penambahan muatanmuatan, tema-tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan kata lain, pendekatan ini melibatkan upaya memasukkan literatur oleh dan tentang masyarakat dari berbagai kebudayaan ke dalam mainstream kurikulum. Misalnya, memanfaatkan muatan khas multikultural seperti tema-tema tentang koeksistensi, pro eksistensi, saling menghargai, saling memahami sebagai pemer kaya bahan ajar. Ketiga, pendekatan transformatif. Berbeda dengan pendekatan aditif, pada pendekatan transformatif ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang sengaja di desain dengan memasukkan di dalamnya konsep-konsep, isu-isu, serta permasalahan-permasalahan terkait multikultural yang didekati dengan pendekatan muqaran (perbandingan) untuk memperbarui pemahaman dan berbagai perspektif serta sudut pandang. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuka perspektif kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya (outsider) untuk memberi komentar dan penjelasan terhadap materi yang dibahas. Keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial ini merupakan gabungan dari pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan memperkaya keterampilan peserta didik dalam melakukan aksi sosial seperti resolusi konflik, rekonsiliasi keberagaman, dan perbedaan budaya. Penerapan pendekatan ini tidak hanya mengikutsertakan peserta didik untuk memahami dan mempertanyakan isu-isu sosial, melainkan sekaligus juga dilibatkan dalam melakukan sesuatu yang penting berkenaan dengan isu tersebut.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya (seperti dinyatakan dalam

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum: Dirasah fi Fiqh al-Ikhtilaf fi Dhau' al-Nusus wa al-Maqasid al-Islamiyah*. (Bank alTaqwa, 1406 H), hlm. 59-188

<sup>26</sup> Irwan Masduqi, *Deradikalisasi Pendidikan Islam* (Jurnal Pendidikan Islam : Volume II no. I Juni2013/1434), h. 9

<sup>27</sup> James A. Banks, *An Introduction to Multicultural Education, Sixth edition* (Boston: Pearson Education, 2017), 30.

motto “Bhineka Tunggal Ika”= Berbeda-beda tetapi tetap satu). Oleh karena itu apabila kebudayaan adalah salah satu landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangannya di Indonesia adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan lagi. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi tiga dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses yang dilaksanakan dengan berbagai kebijakan.

Agar pendidikan lebih multikultural, maka kurikulum model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru harus dibuat multikultural. Isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak deskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh-sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan/model evaluasi hasil belajar. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang dihasilkan bentuk/format GBPP dan komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Pengembangan kurikulum sebagai proses terjadi pada unit pendidikan atau sekolah.

Pengembangan ini harus didahului dengan sosialisasi agar pengembang (guru) dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana belajar/satuan pelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi sesuai dengan prinsip multikultural kurikulum. Yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketiadaan keseragaman. Kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah medium untuk

mengembangkan kepribadian siswa. Dalam pengembangan kepribadian ini pendekatan kurikulum menghendaki kurikulum yang mampu menjadi media pengembang budaya nasional. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti; tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki peserta didik yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Sumber kualitas yang dinyatakan dalam kurikulum tidak pula terbatas pada kualitas yang ditentukan oleh didiplin ilmu semata. Kualitas manusia yang dimaksud adalah kreativitas, disiplin kerja keras, kemampuan kerja sama, toleransi, berfikir kritis manusia yang religius dan sebagainya harus dapat ditonjolkan sebagai tujuan kurikulum. Kurikulum multikultural harus dapat menekankan fungsi pendidikan sama atau lebih penting dibandingkan fungsi pengajaran. Masyarakat sebagai sumber belajar harus dimanfaatkan sebagai sumber konten kurikulum. Oleh karena itu, nilai, moral, kebiasaan, adat/tradisi, dan cultural traits harus dapat diakomodir sebagai konten kurikulum. Konten kurikulum bersifat society and cultural based dan open to problems yang hidup dalam masyarakat. Konten kurikulum harus menyebabkan siswa merasa bahwa sekolah bukanlah institusi yang tidak berkaitan dengan masyarakat tetapi sekolah adalah suatu lembaga sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat dan dapat mengembangkan kualitas kemanusiaan peserta didik. Yang termasuk konten kurikulum yang dapat menunjang pengembangan kemanusiaan peserta didik adalah agama, kesusastraan, bahasa, olah raga dan kesenian. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, maka peserta didik yang belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar (termasuk masyarakat) dan guru bertindak sebagai pemberi kemudahan

bagi siswa dalam belajar. Dalam pendidikan multikultural, pendekatan siswa sebagai subjek dalam belajar member arti bahwa metode adalah alat guru dalam membantu siswa belajar, bukan siswa belajar karena metode guru, metode guru ditentukan oleh cara belajar peserta didik. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru baik dalam konteks sentralisasi atau pun konteks otonomi. Peran guru adalah sebagai pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan peserta didik, oleh karena itu jika kurikulum yang dikembangkan, tidak sesuai apa yang ditentukan oleh kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lanjutan dari keduanya. Pengetahuan, pemahaman dan sikap serta kemauan guru terhadap kurikulum multikultural yang akan sangat keberhasilan kurikulum sebagai proses. Empat hal yang diperhatikan guru dalam pengembangan kurikulum sebagai proses, yaitu: (a) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar; (b) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; (c) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behaviour cultural siswa; (d) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, pesantren mengalami perubahan yang pesat bahkan cenderung menunjukkan tren. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang diidamkan. Kurikulum pesantren “salaf” yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non formal hanya mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab, jadi ada tingkat awal, menengah, dan lanjutan. Namun karakteristik kurikulum dalam pendidikan modern pun mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan yang setara

sekolah-sekolah Islam lainnya (di bawah Departemen Agama), tapi pesantren masih tetap mempunyai cirri khas tersendiri dengan mengembangkan kurikulum lokal pesantren. Fenomena pesantren yang mengadopsi pengetahuan umum untuk santri tetapi tetap mempertahankan ilmu-ilmu Islam klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon-calon ulama yang setia pada Islam tradisional, dan untuk tetap mempertahankan kehasan dari “ pesantren” tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, maka pesantren mencoba untuk, melakukan pembenahan aspek kurikulumnya. Kurikulum pendidikan pesantren modern merupakan perpaduan antara system pesantren salaf dan sistem persekolahan umum dengan harapan mampu memunculkan output yang berkualitas yang tercermin dalam sikap aspiratif, progresif dan ortodok. Dalam pendidikan pesantren salaf proses pembelajarannya masih mengikuti pola tradisional yaitu model sorogan, dan bandongan. Model seperti ini hanya menekankan kiai aktif dan santri pasif. Secara teknis model sorogan bersifat individual, yakni santri menghadap guru secara individual (sendiri) dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Sedangkan model bandongan lebihya bersifat pengajaran klasikal yaitu santri mengikuti palajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Metode pembelajaran di atas tidaklah selalu bisa dikatakan stagnan, atau bahkan tidak relevan kondisi zaman, tapi bisa di pertahankan dengan menambah inovasi. Karena jika cermati, kedua metode tersebut sebenarnya memberikan konsekuensi layanan individual kepada santri. Metode sorogan justru mengutamakan kematangan dan perhatian serta kecakapan seseorang.<sup>13</sup> Metode sorogan memberikan peluang antara kiai dan santri untuk berinteraksi dan mengenal dengan dekat sehingga terjadi hubungan dialogis. Maka

metode belajar sorogan tidak perlu dihilangkan tetapi dimutakhirkan agar sesuai dengan situasi dan kondisi. Sistem penilaian yang dikembangkan di pesantren (salaf) sangat sederhana. Seseorang santri dikatakan sukses bukan dilihat dari hasil pendidikan yang ditentukan oleh angka-angka yang diberikan guru, tapi ditentukan oleh kemampuannya mengajar kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang diperoleh dari orang lain. Jadi potensi lulusan pesantren yang demikian langsung ditentukan oleh masyarakat konsumen.<sup>14</sup> Kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip; keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dan lingkungan sosial-budaya setempat. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti, tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional. Dan kehidupan pesantren dalam era perkembangannya telah berusaha menuju dan menjunjung nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum masa depan yang didasarkan pendekatan multikultural:<sup>15</sup> a. Mengubah filosofi kurikulum dari yang se-ragam ke filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif (esensialisme dan perenialisme) diubah ke filosofi yang menekankan pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai kelompok masyarakat seperti kurikulum progresif; humanism, progresivisme, dan rekonstruksi sosial. b. Teori curriculum content harus berubah dari teori yang mengartikan konten

sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori dan generalisasi kepada pengertian yang cukup pula nilai moral, prosedur, proses dan keterampilan. c. Teori yang digunakan harus memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi dan politik dan tidak hanya berdasarkan teori psikologi belajar yang bersifat individualistik, siswa dalam kondisi value free, tapi harus berdasarkan teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup aktif sebagai anggota masyarakat. d. Poses belajar yang harus di dasarkan pada proses yang memiliki tingkat isomorphis yang tinggi dengan kenyataan sosial, artinya proses belajar dengan cara belajar kelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif. Sehingga peserta didik terbiasa hidup dengan dengan berbagai keragaman budaya, sosial, dan intelektualitas, ekonomi dan aspirasi politik e Evaluasi haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan, alat evaluasi seperti pengguna alternative assessment (portofolio, catatan observasi, wawancara

## KESIMPULAN

Radikalisasi agama menjadi problema dan hambatan bagi suasana dan perkembangan pesantren. Sebagai konsekuensi, pesantren harus memberikan respon yang signifikan. Menekankan ilmu dasar keimanan kepada santri, menghantarkan pada pemahaman konsep akhlakul karimah yang terejawantahkan pada perilaku santri yang santun dan bermartabat. Di samping itu, sebagai kekuatan masyarakat pesantren harus menghabitiskan wajah multikultural dalam wujud interaksi sosial. Pendidikan pesantren harus berbasis multikultural, artinya pendidikan yang diberikan kepada santri tidak menciptakan pemahaman yang tunggal (monokultural), termasuk di dalam pemahaman tentang realitas keberagaman. Menghormati pluralisme melahirkan humanisme yang akan membawa makna besar dalam kehidupan bersama dalam segala bidang. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya, dengan eksisnya berbagai aliran keagamaan dewasa ini kesemua hal ini haruslah penerapan dan penyampaiannya dengan komunikasi yang baik.

Pembenahan sistem pendidikan di pesantren telah membawa ke arah suatu pembaharuan, menjadikan pesantren yang modern dan tetap survive dalam masyarakat. Pesantren selalu merespons perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Ada dua cara untuk merespons perubahan: merevisi kurikulum dan membuka kelembagaan dan fasilitas fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Bahkan tradisi keagamaan yang dimiliki pesantren sebenarnya merupakan ciri khusus yang harus dipertahankan, karena di sinilah letak kelebihannya. Untuk memainkan peranan yang besar dan menentukan dalam lingkup nasional pesantren-pesantren kita tidak perlu kehilangan kepribadiannya sendiri sebagai tempat pendidikan keagamaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, Muhammad 'Athiyah, al-, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Alam, Masnur, *Model Pesantren Modern Sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*. Jakarta: GP Press, 2011.
- Attas, Syed Muhammad Naquib, al-, (ed), *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga PostModernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Waspada Paham Radikal*. Kompas, 7 April 2015.
- Effendy, Bahtiar, "Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik", dalam M. Dien Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Hamidy, B Harahap, *Mandailing Natal Yang Madani*. Jakarta : PT Metro Pos, 2004
- K. Nottingham, Elisabeth, *Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- M. Nuhrison Nuh (ed.), *Peranan Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- M. Syafi'i Anwar, "Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme", dalam *Jurnal Al-Washatiyyah*, No 1, Februari, 2006.
- Mulyana, Deddy. 2011. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman Mantu Bina-Damai dalam *Komunitas Pesantren*, jurnal, Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015.

- Salenda, Kasjim *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009
- Susilo, Lex Wijoyo, "Shaykh Nawawi of Banten: Texts, Authority, and the Gloss Tradition," *Ph.D. Dissertation*. New York: Columbia University, 1997.
- Sunyoto, Agus *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah Yang Disingkirkan*. Jakarta: Transpustaka, 2011
- Wiktorowicz, Quintan, *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Jakarta: Gading Publishing, 2012
- Yuli, Thohir Kusmato, dkk. Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren, *jurnal Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015